

## **BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel TPP berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Kedu. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka secara tidak langsung akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan karena pendidikan dapat meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih tinggi, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karier. Sehingga pendidikan perempuan merupakan investasi jangka panjang yang efektif untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan modal manusia.
2. Variabel TPAKP berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Kedu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan TPAKP di wilayah Eks Karesidenan Kedu sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain itu, perempuan di Eks Karesidenan Kedu terlibat di sektor formal seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, serta di sektor informal seperti pertanian. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Sehingga semakin banyaknya perempuan yang berada pada pasar tenaga kerja, maka

persentase kemiskinan akan menurun karena penambahan jumlah perempuan yang bekerja dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga yang akan menurunkan persentase tingkat kemiskinan.

3. Variabel TKPP berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Kedu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama seperti peran perempuan di parlemen yang mampu memperjuangkan isu-isu strategis yang mendukung kelompok rentan dan pembangunan sosial sehingga perempuan di parlemen mampu mendorong kebijakan yang lebih inklusif, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja bagi perempuan dan masyarakat miskin. Selain itu, keterlibatan perempuan di parlemen menciptakan kebijakan sosial yang ramah keluarga dan fleksibel seperti dukungan untuk pekerjaan yang memungkinkan perempuan untuk tetap produktif tanpa mengorbankan peran domestik, hal ini meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan sekaligus mengurangi tekanan ekonomi pada rumah tangga miskin. Sehingga peran perempuan dalam parlemen tidak hanya penting untuk pengambilan keputusan yang inklusif, tetapi juga memiliki dampak dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Kedu.
4. Variabel TPT berpengaruh positif terhadap kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Kedu. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut seperti jumlah penduduk usia produktif

yang tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup sehingga menyebabkan banyak individu menganggur. Sebagian besar pekerja di wilayah ini terjebak dalam sektor informal dengan pendapatan yang rendah dan status pekerjaan yang tidak stabil dan penggunaan teknologi yang semakin canggih menggantikan pekerjaan manusia, terutama untuk tenaga kerja dengan keterampilan rendah sehingga dapat meningkatkan angka pengangguran. Pengangguran di wilayah ini tidak hanya berdampak pada penurunan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga akan memperburuk siklus kemiskinan melalui keterbatasan akses pekerjaan, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan dalam peluang kerja antara wilayah desa dan kota. Tingginya angka pengangguran terbuka dapat berkontribusi pada menurunnya pendapatan rumah tangga, terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini adapun implikasinya yaitu sebagai berikut :

1. TPP (Tingkat Pendidikan Perempuan) berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, sehingga kebijakan diperlukan untuk dapat mendorong peningkatan pendidikan perempuan setiap tahunnya. Karena semakin tingginya pendidikan perempuan dapat meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih tinggi, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karier. Beberapa kebijakan

mengenai pendidikan terutama pada perempuan di wilayah Eks Karesidenan Kedu sudah berjalan dengan baik, adanya beberapa program yang mendukung pemberdayaan perempuan sehingga dapat memperbaiki kualitas modal sumber daya manusia khususnya bagi perempuan, namun masih terdapat beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi dan dioptimalkan kembali, kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Kabupaten Magelang perlu mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga dan meningkatkan personal, sosial, dan vokasional perempuan marginal dengan strategi yang dilakukan seperti memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk dapat mengikuti pendidikan karena pendidikan berkelanjutan merupakan kesempatan belajar bagi orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan tanpa batasan usia dan ruang. Hal ini dapat mencegah adanya mitos kaum perempuan sebagai pelengkap rumah tangga sehingga dengan diberikan kesempatan seluas-luasnya pendidikan, kaum perempuan mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan kaum perempuan dapat mandiri serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Kabupaten Temanggung memiliki persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas baik laki-laki maupun

perempuan selama beberapa tahun terjadi peningkatan. Persentase pendidikan laki-laki mengalami peningkatan sebesar 2,05 persen pada tahun 2022, sedangkan perempuan meningkat sebesar 0,03 persen pada 2022. Hal ini masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam pendidikan sehingga diperlukan program untuk mengatasi ketimpangan gender dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan.

- c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang rendah di Kabupaten Wonosobo memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya IDG dan merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Wonosobo perlu mengintegrasikan perspektif perempuan secara lebih mendalam dengan harapan efektivitasnya dalam menghasilkan program yang konkret dapat ditingkatkan, terutama dalam mengenai isu-isu ketimpangan gender, termasuk akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan.
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam upaya pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Kebumen hasilnya masih belum optimal. Perlunya evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan perempuan dalam proses demokratisasi. Selain itu, masih diperlukan evaluasi terhadap program-program pendidikan

perempuan untuk memastikan bahwa program-program tersebut selalu relevan dengan tantangan baru yang timbul dalam masyarakat.

- e. Melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan seperti Serat Kartini di Kabupaten Purworejo juga perlu ditingkatkan guna merumuskan kebijakan yang mendukung pendidikan perempuan. Serat Kartini merupakan model pemberdayaan perempuan di Kabupaten Purworejo yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas perempuan melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis, solidaritas, hingga pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut dan memastikan bahwa semua program pendidikan perempuan berjalan dengan baik.
- f. Tingginya angka pernikahan dini perempuan di Kota Magelang mendorong perlunya kebijakan yang memprioritaskan pendidikan bagi perempuan. Pemerintah dapat mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Melakukan kolaborasi dengan komunitas, tokoh masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan peluang karier yang lebih luas sehingga perempuan dapat mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi di pasar tenaga kerja. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah harus dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki.

2. TPAKP (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan) berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, karena partisipasi angkatan kerja perempuan yang tinggi dapat mencerminkan emansipasi perempuan dan kesetaraan gender di wilayah Eks Karesidenan Kedu. Sehingga kebijakan diperlukan untuk dapat mendorong peningkatan angkatan kerja perempuan setiap tahunnya, kebijakan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui program pemberdayaan di Kabupaten Magelang. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Terdapat perbedaan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan, TPAK perempuan cenderung lebih rendah di banding TPAK laki-laki di Kabupaten Magelang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangat penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan sehingga pencapaian pembangunan manusia berbasis gender sangat diperlukan.
  - b. Dimensi pasar tenaga kerja di Kabupaten Temanggung direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK perempuan mengalami peningkatan yang

lebih besar dibandingkan dengan TPAK laki-laki. TPAK perempuan meningkat sebesar 8,74 persen pada tahun 2022 dan TPAK laki-laki meningkat sebesar 5,42 persen. Walaupun peningkatan TPAK perempuan yang lebih tinggi, namun basis poinnya lebih rendah, artinya kesempatan untuk memasuki pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki belum setara sehingga diperlukan profram untuk mengatasi hal tersebut yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Temanggung.

- c. Mengembangkan program pengentasan kemiskinan berbasis komunitas yang melibatkan perempuan secara aktif di Kabupaten Wonosobo seperti Jaringan Perempuan Usaha Kecil untuk meningkatkan perannya sebagai katalisator pengembangan usaha kecil, melalui upaya-upaya pemantapan kapasitas, serta peningkatan kemandirian sehingga mampu meningkatkan TPAK perempuan di Kabupaten Wonosobo karena semakin banyak perempuan mengikuti kegiatan komunitas tersebut maka akan semakin meningkat kesadaran perempuan akan pentingnya membuat jaringan usaha di mana Kabupaten Wonosobo merupakan wilayah dengan TPAK perempuan tertinggi di Eks Karesidenan Kedu.
- d. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Kebumen melalui Musrenbang sangat memperhatikan kebutuhan perempuan karena dalam Musrenbang melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen untuk memastikan



bahwa kebijakan ekonomi mencerminkan kebutuhan perempuan termasuk kesempatan kerja yang inklusif. Hal ini dapat mengurangi hambatan yang sering menghalangi perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja.

- e. Perempuan dapat menjadi pelopor perubahan sosial di lingkungan dan mampu memperjuangkan kesetaraan di keluarga maupun komunitas di Kabupaten Purworejo sehingga mampu mendorong dalam kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat melalui beberapa pelatihan yang disediakan oleh pemerintah seperti Pelatihan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PEEP) dan Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam berbagai Bidang Pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi perempuan untuk memperluas partisipasi perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Purworejo.
- f. Pemerintah Kota Magelang diharapkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut terlibat aktif dalam mengarusutamakan gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan perhatian yang menyeluruh terhadap kebutuhan dan potensi perempuan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan di Kota Magelang. Selain itu, pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja perempuan di Kota Magelang juga masih diperlukan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam berkompetisi di dunia kerja.

3. TKPP (Tingkat Keterlibatan Perempuan di Parlemen) berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, karena keterlibatan perempuan di parlemen memiliki potensi menghasilkan kebijakan yang lebih pro-perempuan, seperti perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan peningkatan hak-hak sosial ekonomi perempuan. Oleh karena itu, kebijakan untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan di parlemen sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Kebijakan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Diperlukan kebijakan di Kabupaten Magelang yang dirancang secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi perempuan di berbagai bidang salah satunya bidang politik dengan tujuan program-program pembangunan dapat memberikan dampak yang nyata. Kebijakan ini dapat melalui sosialisasi politik bagi perempuan di Kabupaten Magelang dengan tujuan untuk menambah wawasan berpolitik bagi perempuan. Melalui sosialisasi politik diharapkan dapat mendorong keterlibatan perempuan dalam setiap aspek kehidupan baik dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi.
- b. Faktor sosial budaya yang telah berkembang di Kabupaten Temanggung mengakibatkan perbedaan pandangan tentang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagian perempuan yang memutuskan untuk masuk ke dunia kerja pun tidak jauh dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Hal ini dapat berdampak pada

rendahnya partisipasi kerja perempuan di sektor formal seperti di dunia politik. Politik menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi terutama dengan kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan di bidang politik, diharapkan tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang bias gender. Namun pada kenyataannya, dunia politik di Kabupaten Temanggung masih didominasi oleh kaum laki-laki sehingga diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan responsif gender yang meliputi tiga aspek yaitu perencanaan komitmen politik, pelaksanaan yang meliputi struktur organisasi dan sumber daya, serta *monitoring* dan evaluasi yang meliputi data terpilih, alat analisis gender, dan dukungan masyarakat.

- c. Mengadakan program pendidikan politik bagi perempuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak politik dan proses pemilihan di Kabupaten Wonosobo. Mendorong pembentukan jaringan organisasi perempuan yang dapat saling mendukung dalam proses politik juga diperlukan sebagai bentuk dorongan dalam berbagi informasi dan sumber daya dan melakukan kampanye untuk mengubah perspektif negatif terhadap pemimpin perempuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Wonosobo.
- d. Keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Kebumen belum mencapai kuota minimal 30%. Jumlah keterwakilan perempuan di

parlemen berkisar 25 persen. Angka tersebut membuktikan bahwa kaum perempuan di Kabupaten Kebumen masih belum terlibat aktif untuk berpolitik. Diperlukan adanya kegiatan pendidikan politik bagi perempuan untuk membuka pemahaman tentang politik bagi perempuan serta meningkatkan partisipasi politik bagi perempuan di Kabupaten Kebumen.

- e. Rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Purworejo adalah 15,87 persen di mana hal ini Kabupaten Purworejo belum menyentuh minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen yang berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sehingga diperlukan kebijakan untuk menarik partisipasi perempuan di parlemen pada Kabupaten Purworejo. Kebijakan tersebut dapat berbentuk penciptaan organisasi yang lebih sehat dan menghasilkan keputusan yang komprehensif dan inklusif, karena perempuan memiliki peran yang besar dari masa sebelum kemerdekaan hingga detik ini agar lebih banyak menarik partisipasi perempuan untuk ikut serta di parlemen.
- f. Kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan di parlemen Kota Magelang menjadi kebutuhan penting dalam mendorong representasi yang lebih inklusif. Kampanye kesadaran masyarakat melalui seminar, diskusi publik, dan media sosial juga perlu ditingkatkan untuk mendapat pemahaman tentang perempuan dalam politik. Selain itu, pengembangan sistem *monitoring* berbasis data

terpilah gender dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil di Kota Magelang melalui pelatihan serta advokasi untuk memperkuat peluang perempuan berperan aktif di parlemen Kota Magelang, sekaligus dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

4. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka pengangguran yang dapat berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu. Adanya ketidakseimbangan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja menjadi salah satu penyebab meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Maka dari itu kebijakan di beberapa daerah wilayah Eks Karesidenan Kedu diperlukan untuk mencegah peningkatan pengangguran terbuka, kebijakan-kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang merupakan capaian TPT tertinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2022. Permasalahan ini muncul karena penyerapan tenaga kerja kurang optimal yang disebabkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja belum optimal serta fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompeten juga belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk mempercepat pengurangan pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang seperti penyiapan tenaga kerja yang

berkualitas melalui peningkatan keterampilan untuk para tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja.

- b. Menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Temanggung sebagai bentuk upaya pengurangan pengangguran terbuka karena dengan lebih banyak jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, maka dapat membantu mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai.
- c. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Kabupaten Wonosobo meningkat. Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan di mana tingkat pengangguran terbuka sejumlah 3,47 persen pada tahun 2019, dan mengalami kenaikan menjadi 5,37 persen pada tahun 2020. Sehingga untuk mengatasi kenaikan angka pengangguran di Kabupaten Wonosobo, diperlukan adanya kebijakan. Kebijakan tersebut dapat melalui pengadaan pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan tenaga kerja di tengah tuntutan perkembangan zaman yang harus dipenuhi. Pelatihan ini dapat menjadi sebuah solusi alternatif dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dan menjadi kontribusi positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo.

- d. Kabupaten Kebumen perlu mengembangkan pelatihan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan industri lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan untuk menciptakan kurikulum pelatihan yang relevan sehingga menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Selain itu, Kabupaten Kebumen perlu memperkuat sistem informasi pasar kerja yang memudahkan pencari pekerjaan untuk menemukan lowongan yang sesuai dengan penggunaan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat luas.
- e. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Purworejo juga perlu dikembangkan dapat melalui program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal untuk mengetahui bidang keterampilan yang dibutuhkan perusahaan di daerah tersebut sehingga pelatihan yang diberikan relevan dan efektif. Selain itu, pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan masyarakat umum di Kabupaten Purworejo juga diperlukan untuk memulai usaha mereka sendiri sehingga dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal.
- f. Kota Magelang merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di antara 6 wilayah lainnya di Eks Karesidenan Kedu. Sehingga, masih diperlukan kebijakan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka agar dapat menjadi

salah satu pengentasan kemiskinan. Pengentasan pengangguran di Kota Magelang adalah di sektor informal karena tidak ada perusahaan/pabrik yang menyerap tenaga kerja dengan skala besar atau banyak wirausaha di wilayah ini yang mungkin mampu untuk menyerap tenaga kerja. Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah daerah di bidang pelatihan juga diperlukan di wilayah ini. Pelatihan-pelatihan tersebut mampu menambahkan *skill* dan menciptakan *entrepreneur* mulai dari kuliner dan jasa lainnya.

